



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat WA Live Chat. 0823-9888-8900
website <https://sulbar.bpk.go.id>,
Sosial Media X, Instagram, Youtube, TikTok: @bpkrisulbar

SIARAN PERS

PENYERAHAN LHP KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMILU PADA SATKER KPU PROV. SULBAR DAN LHP KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH PADA KAB. POLMAN DAN MAMASA TA 2024

Mamuju – Humas dan TU Perwakilan

Rabu (08/01) – sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2024 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan keuangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 periode tahun 2023 s.d. semester 1 Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum (Satker KPU) Prov. Sulawesi Barat dan PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2024 (s.d. September 2024) pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa yang ditujukan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan pemilu pada Satker KPU Prov. Sulbar dan pengelolaan belanja daerah pada Kab. Polewali Mandar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun untuk pengelolaan belanja daerah pada dan Kab. Mamasa belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas pemeriksaan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat **I Putu Wisudhantara**, didampingi Kepala Subauditorat, **Rizki Satriyo Nugroho**, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DTT atas pengelolaan keuangan Pemilu 2024 periode tahun 2023 s.d. September Tahun 2024 kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September 2024) pada Pemkab Polewali Mandar dan Mamasa masing-masing kepada Ketua DPRD Kabupaten atau yang mewakili dan Pj. Bupati atau yang mewakili.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan Pemilu 2024 pada Satker KPU Prov. Sulbar, pengelolaan belanja daerah tahun 2024 pada Pemkab Polewali Mandar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku. Namun terkhusus untuk dan Pemkab Mamasa diketahui bahwa pengelolaan belanjanya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebabkan karena permasalahan utama yang ditemukan yaitu pengelolaan Belanja Tidak Terduga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Akibat dari permasalahan tersebut, terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp1.485.909.009,27. I Putu Wisudhantara menambahkan “Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pimpinan Satuan Kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi”.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi pendorong dan motivasi dalam melaksanakan perbaikan pengelolaan keuangan di tahun



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat WA Live Chat. 0823-9888-8900
website <https://sulbar.bpk.go.id>,
Sosial Media X, Instagram, Youtube, TikTok: @bpkrisulbar

SIARAN PERS

berikutnya dan berharap agar DPRD dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam mengingatkan agar Satuan Kerja/pemerintah daerah untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**